

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa di sampulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 mengenai hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar di Kecamatan Mandastana masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya sekolah yang belum memahami hak anak berkebutuhan khusus, stigma dan diskriminasi di sekolah, kurangnya sarana dan prasarana ramah difabel, tenaga pendidik yang belum terlatih, dan kurikulum yang belum mengakomodasi kebutuhan mereka.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal mengalami beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya seperti kurangnya komunikasi dan pemahaman kebijakan, minimnya Guru Pendamping Khusus, anggaran yang tidak memadai, sarana dan prasarana yang belum ramah difabel, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini demi tercapainya hak pendidikan yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Mandastana.

B. Saran

Untuk memperbaiki kebijakan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Mandastana, maka diharapkan pemerintah daerah dan dinas Pendidikan:

1. Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Mengadakan sosialisasi berkala dan menyeluruh kepada semua sekolah kemudian Menggunakan berbagai media untuk menyampaikan informasi kebijakan secara jelas dan konsisten.

Perlu juga adanya anggaran yang memadai untuk sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusif atau pemenuhan Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

2. Kepala Sekolah sebagai penyelenggara Pendidikan agar sekiranya memastikan bahwa setiap guru memahami kebijakan secara menyeluruh. Sosialisasi internal yang rutin dapat membantu memperkuat pemahaman terhadap kebijakan tersebut serta susun rencana anggaran yang komprehensif untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung anak berkebutuhan khusus. Masukkan usulan ini ke dalam anggaran sekolah dan ajukan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Guru sebagai pelaku yang memberikan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus diharapkan agar bisa berinisiatif untuk mempelajari secara mendalam isi kebijakan dan memastikan pemahaman yang komprehensif. Mengikuti pelatihan, workshop, atau seminar yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga pendidikan lainnya dapat membantu meningkatkan pemahaman. Meskipun jumlah Guru Pembimbing Khusus masih minim, guru kelas harus bekerja sama dengan mereka untuk memastikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang memadai. Selain itu, guru kelas bisa saling berbagi informasi dan strategi pengajaran yang efektif.